

**PAPUA AKTUAL 2004**

(April - Juni)

**Sekilas Informasi**

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN**

**KEUSKUPAN JAYAPURA**

## KATA PENGANTAR

Dalam laporan berkala ini kami sajikan rangkuman pengamatan peristiwa-peristiwa selama tiga bulan, April sampai dengan Juni tahun 2004. Berdasarkan rangkuman ini, kami menyusun suatu uraian yang lebih mendalam guna menunjuk sejumlah arah perkembangan yang tersirat dalam peristiwa-peristiwa tadi. Kami berpendapat, catatan berkala ini sangat pentinglah untuk membantu khalayak pembaca yang berminat memahami dinamika sosial kemasyarakatan di Papua sehingga dapat menilai setiap peristiwa yang terjadi di daerah ini dengan pemahaman yang kontekstual dan dapat juga membantu masyarakat Papua untuk menempatkan dirinya secara baik dalam perubahan yang sedang berlangsung.

Pada bagian pertama dari uraian ini berisi rangkuman pengamatan peristiwa, kemudian disusul dengan uraian atas rangkuman peristiwa-peristiwa tersebut (Bagian II).

Selamat membaca!

Jayapura, 10 Juli 2004

Frederika Korain, SH  
Staf SKP Keuskupan Jayapura

## BAGIAN I

### RANGKUMAN PERISTIWA SELAMA APRIL-JUNI 2004

Beberapa hal utama yang terjadi di bulan Maret 2004 yang kemudian mewarnai peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kurun waktu April-Juni 2004, kami cantumkan sebagai berikut :

- ❖ *26 Maret:* Sidney Jones, Direktur International Crisis Group Asia Tenggara yang berkantor di Jakarta menyatakan, pemerintah Indonesia saat ini nampak salah dalam menangani konflik di Papua. Hal ini terlihat dari gagalnya pemerintahan Megawati dalam menerapkan Otonomi Khusus untuk Papua. Kebijakannya mengeluarkan Inpres Pemekaran Provinsi justru memperbesar keterpecahan antar etnis (suku) di Papua, bahkan memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan gerakan menuntut pemisahan diri, terangnya.
- ❖ *30 Maret:* Menteri Perhubungan RI mengumumkan kenaikan tarif telepon sebesar 9-28 % mulai 1 April 2004.
- ❖ *31 Maret:* Dalam sidang lanjutan kasus gugatan Pangdam Trikora terhadap Elsham Papua di PN Jayapura, pihak Kodam menghadirkan saksi Decky Murib yang dalam keterangannya mengatakan, dirinya diminta Elsham dan Lemasa menandatangani sebuah surat pernyataan yang isinya menegaskan bahwa pelaku penembakan di mile 62-63 Timika adalah TNI. Padahal diakuinya ia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Iapun menandatangani pernyataan itu karena dijanjikan akan diajak jalan-jalan ke Amerika, diberikan uang tunai sebesar Rp 10 juta dan sejumlah uang Dollar Amerika. Dalam jumpa pers se usai sidang, Pangdam Trikora Nurdin Zainal mengatakan kesaksian Decky Murib menunjukkan kebohongan Elsham, dan Elsham terbukti mencemari nama baik TNI karena menyebabkan masyarakat menjadi tidak simpati terhadap TNI. Pihak Elsham sendiri tidak hadir pada persidangan ini.

#### BULAN APRIL- JUNI

- ❖ *2 April:* Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No. 21/2004 tentang Pelaksanaan Pemilu Susulan di semua wilayah di Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum Pusat setelah melihat adanya kesulitan di lapangan dalam pendistribusian logistik Pemilu: kertas pemilih, kertas suara, cap, tinta, kotak suara dan bilik suara.
- ❖ *3 April:* Briptu Anwar, petugas pengamanan Pemilu dari Polres Merauke dan Kornelius Yolman Silooy, anggota Panwaslu (Petugas Pengawas Pemilu) Merauke yang ditugaskan mengantar logistik Pemilu ke Distrik Okaba-Merauke, meninggal dunia setelah diserang oleh kelompok tak dikenal di Kampung Yowit, Okaba. Kelompok ini juga menyandera 8 orang warga Kampung Yowit. Penyerangan tersebut membuat Polres dan Kodim Merauke

mengirimkan pasukan Polri dan TNI masing-masing sebanyak 2 regu ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian sedang menyelidiki identitas dan motif dari penyerang.

- ❖ *5 April*: Sekda Provinsi Papua Drs. Decky Asmuruf menegaskan sampai 'mati' ia tetap bertekad untuk memperjuangkan agar Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi demi mempermudah jalannya pembangunan.
- ❖ *5 April*: berlangsung Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Legislatif di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 24 Partai Politik. Pemilu di Papua sendiri berlangsung dalam dua wilayah administrasi yang berbeda yakni, Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Di kedua wilayah ini Pemilu tidak berlangsung serentak karena keterlambatan pengiriman logistik Pemilu. Khusus di Irian Jaya Barat, tidak ada mekanisme penyeleksian para calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu sebagaimana proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- ❖ *5 April*: masyarakat se-kota Sorong, Irian Jaya Barat, tidak dapat mengikuti Pemilu akibat tertahannya logistik Pemilu di Biak. Ketiadaan logistik juga menyebabkan sejumlah TPS di Kota Manokwari tidak menyelenggarakan Pemilu.
- ❖ *6-9 April*: wilayah-wilayah di Provinsi Papua yang perlu diadakan Pemilu susulan akibat terlambatnya pengiriman logistik Pemilu adalah, Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya, Mappi, Boven Digul, Distrik Okaba-Kabupaten Merauke dan Kelurahan Tanjung Ria-Distrik Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura; sedangkan sebagian besar wilayah di Irian Barat mengadakan Pemilu susulan.
- ❖ *7 April*: Dalam seminar Jubileum 50 tahun Injil Masuk di Lembah Baliem (sejak 20 April 1954) yang diadakan di Wamena, Gereja-Gereja di Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap kegiatan pembangunan dan perubahan sosial di Kabupaten Jayawijaya yang sangat memprihatinkan (*teks lengkap terlampir*). Isi pernyataan menyuarakan kecemasan masyarakat baik menyangkut perkembangan suasana perebutan umat antar agama maupun kegagalan pemerintahan untuk melayani masyarakat sepatutnya.
- ❖ *7 April*: Dalam lanjutan sidang gugatan UU No. 45/1999 tentang Pemekaran Irian Jaya di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Gubernur Irian Barat Abraham Atururi memberi keterangan bahwa masyarakat di Irian Barat (Manokwari, Fak-fak dan Sorong) menyetujui pemekaran, sedangkan yang menolak hanyalah mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
- ❖ *8 April*: 19 partai politik (minus Golkar dan PDI-P) dalam pertemuannya di Hotel Le Meridien Jakarta, menuntut KPU melakukan Pemilu ulang karena mereka menilai telah terjadi beberapa pelanggaran dan kecurangan seperti: banyak warga yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena tidak terdaftar, terhambatnya penyaluran

logistik ke tempat-tempat pemilihan, praktek *money politic* saat pemungutan dan penghitungan suara/hasil pemilu.

- ❖ *8 April*: Ketua KPU Kota Jayapura, La Pona, mengatakan pihaknya telah melaporkan oknum caleg provinsi salah satu parpol ke Polresta Jayapura karena yang bersangkutan menahan logistik pemilu di rumahnya yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemilu di 25 TPS di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kemudian pada tgl. *12 April* Ketua KPU Kota Jayapura menyatakan bahkan pihaknya mendapatkan adanya TPS ilegal di Kotaraja, Kelurahan Vim, Jayapura dimana pencoblosannya diatur oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) dan anggota dari salah satu partai politik. Tindakan tersebut dianggap melanggar UU Pemilu No. 12/2003.
- ❖ *12 -13 April*: Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Longgena Ginting menjelaskan bahwa setiap bulannya sekitar 600 ribu meter kubik kayu gelondongan diselundupkan dari Papua dengan negara tujuan: Malaysia, Taiwan, China, Vietnam dan India. Menurutnya, praktek penyelundupan tersebut semakin menambah kerusakan hutan dan meniadakan devisa bagi negara.
- ❖ *13 April*: saat meresmikan Gedung Poltek Elektro Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Manuel Kaisepo mengakui adanya gangguan separatis dalam kegiatan pembangunan di KTI. Menurutnya, kelompok separatis muncul karena ketidakpuasan sosial melihat daerahnya begitu kaya namun mereka hidup dalam kemiskinan. Maka dalam pengembangan pembangunan di KTI, pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM, mengingat kualitas SDM di KTI sangat rendah dari rata-rata nasional dan negara barat bila diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
- ❖ *13 April*: Mundo Suklayo (34 th), korban penyerangan Abepura 7 Desember 2000 yang lumpuh akibat tulang belakangnya yang membengkak setelah mendapat penyiksaan di Polsek Abepura, meninggal dunia di kediamannya di Jl. Baru-Abe Pantai, Jayapura. Jenasahnya dimakamkan di Pekuburan Tanah Hitam, Abepura pada 14 April, hanya dihadiri oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura (sejumlah LSM) dan sanak keluarganya yang sama-sama berasal dari Kobakma, Wamena Barat, yang menetap di Jayapura. Almarhum meninggalkan puluhan korban warga sipil lainnya yang sedang mengharapkan keadilan dari peradilan HAM kasus Abepura di Makassar nanti.
- ❖ *14 April*: dalam kelanjutan persidangan (*lihat: catatan 31 Maret 2004*) penasehat hukum Elsham Papua menyatakan keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jayapura setelah permintaan mereka untuk menghadirkan saksi Decky Murib ditolak oleh Ketua Majelis Hakim, FX Sugiarto, SH.
- ❖ *14 April*: Dirjen Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI menetapkan 5 orang anggota Majelis Hakim untuk keperluan persidangan kasus

pelanggaran berat HAM Abepura di Pengadilan Negeri Makassar. Para hakim tersebut berasal dari Peradilan HAM Jakarta dan pernah menangani persidangan ad-hoc kasus pelanggaran HAM Tim-Tim dan Tanjung Priok. Persidangan kasus Abepura di Pengadilan HAM Makassar nanti merupakan pengadilan HAM pertama yang permanen di Indonesia setelah adanya UU Pengadilan HAM No. 26/2000.

- ❖ *15 April*: sekitar 200 orang warga Biak mendatangi kantor DPRD Biak dan menyampaikan dukungannya kepada pemerintah pusat agar memekarkan Provinsi Papua Tengah, dengan ibukotanya di Biak dan Pejabat Gubernurnya adalah Laksamana Laut Henk Wabiser (mantan Komandan Angkatan Laut V Papua). Menurut kelompok ini, alasan pemilihan Wabiser karena Papua membutuhkan figur publik dari kalangan TNI/Polri untuk menegakkan disiplin dan kinerja pegawai agar melayani masyarakat secara maksimal. Aksi ini dipelopori oleh Tim 12 yang terdiri dari Micha Ronsumbre, Zon Komboy, Max Mansawan (ketua KNPI Biak), Nehemia Wospakrik, WL Maran, Ny. Alama Mampioer, Marinus Ronsumbre, Zakarias Kafiar, Pdt. YK Palangan; mereka mewakili kelompok pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, perempuan dan agama. Aspirasi ini mendapat dukungan dari paguyuban warga non-Papua yang berada di Biak seperti Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Selatan. Tuntutan pemekaran Provinsi Papua Tengah yang diajukan kelompok 12 ditolak oleh Dewan Adat Biak yang diketuai oleh Yan Pieter Yarangga yang mengatakan, aspirasi tersebut terlebih dahulu perlu didialogkan dengan seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan.
- ❖ *16 April*: Mantan Gubernur Irja Barnabas Suebu, SH dan mantan anggota DPR-RI Simon Morin meminta perhatian pemerintah pusat agar tidak menciptakan konflik dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, tetapi secara sungguh-sungguh membangun masyarakat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia dengan melaksanakan Otonomi Khusus secara penuh. Mereka juga meminta pihak-pihak yang berada dibalik upaya pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah di Biak agar menghentikan segala rekayasanya karena hanya akan menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.
- ❖ *17 April*: Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhaji, pengacara DPRD Papua yang mengajukan *judicial review* terhadap Inpres Pemekaran, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA), meminta pencabutan terhadap dua keputusan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengenai Pemilu di Irja Barat, karena kedua putusan tersebut dinilai bertentangan dengan UU Pemilu No. 12/2003 mengingat Irja Barat bukanlah salah satu daerah pemilihan sesuai UU Pemilu. Keputusan yang diminta untuk dicabut yakni, SK KPU No. 672/2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pemilih, Jumlah Kursi DPRD Provinsi sebanyak 44 buah, jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kotamadya se-Irja Barat; dan Surat Sekjen KPU No. 442/UP/KPU/XII/2003 tentang pengangkatan Sekjen KPUD Provinsi Irja Barat. Pencabutan juga diminta atas dasar keputusan KPU tersebut tidak menghormati proses hukum yang sedang

berlangsung di Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan pembentukan Provinsi Irija Barat.

- ❖ *18 April:* Pentahbisan Uskup Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr. oleh Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM. Selain umat dan para petugas gereja yang menghadiri perayaan tersebut, hadir juga Gubernur Papua Drs. JP Solossa, Ketua Pengadilan Tinggi Suharsono, SH, Kapolda Irjen Pol. Drs. Timbul Silaen dan Kasdam XVII/Trikora Mayjen TNI Gerson Manurung.
- ❖ *20 April:* Konvensi penetapan calon presiden Partai Golkar di Jakarta dimenangkan oleh Jenderal Purn. Wiranto, mengalahkan tokoh sipil yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Ir. Akbar Tandjung. Kemenangan Wiranto memicu banyak kritik dari organisasi-organisasi pejuang HAM nasional dan internasional (HRW, TAPOL, ETAN) tentang keterlibatannya dalam berbagai tindak pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di berbagai tempat di Indonesia dan juga pasca jajak pendapat di Tim-Tim yang menyeretnya ke Pengadilan HAM Ad-Hoc Tim-Tim di Jakarta.
- ❖ *20 April:* Aparat polisi dan anggota Brimob dari Polsek Babo menembak lima warga Kampung Mariedi, Distrik Fufuruar, Teluk Bintuni, menewaskan 5 orang dan melukai 2 lainnya. Korban yang meninggal: Anna Arfa (25), Selviana Wesin, Mathius Nasira (54), Thimotius Nasira (50) dan Bernard Furima. Dua orang yang terluka: Manase Furima dan Mathias Furima yang sedang dirawat di RSUD Manokwari, dijadikan tersangka oleh Polres Manokwari.
  - ☐ Keterangan dari pihak Polda Papua, korban yang ditembak di Kampung Mariedi, Teluk Bintuni, merupakan anggota GPK-OPM yang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian yang bertugas mengawasi staf Djayanti Group (perusahaan HPH) yang hendak membayar ganti rugi hak ulayat atas areal hutan yang ditebangnya kepada warga Mariedi.
  - ☐ Metusalak Awom, SH, pengacara dari LP3BH Manokwari menyatakan, peristiwa Mariedi merupakan perlawanan terhadap kegiatan HPH PT Djayanti Group yang sudah beroperasi selama 20 tahun tanpa memperhatikan batas-batas wilayah Hak Ulayat yang dilarang masyarakat setempat. Disisi lain, penembakan tersebut kemungkinan sebagai upaya mengganggu keputusan perusahaan gas alam, BP di Weriagar, yang memberikan tugas pengamanan kepada masyarakat sipil. Tempat kejadian hanya berjarak sekitar 60 km dari lokasi BP.
  - ☐ Menurut Pastor Vincent Nuhuyan, Pr dirinya tidak percaya jika warga Mariedi menyerang polisi karena bukan merupakan karakter masyarakat setempat. Juga tidak ada kelompok TPN/OPM disana, yang ada hanyalah kelompok sekte

baru atau gerakan Mesianik yang dipimpin oleh Bernard Furima yang mati ditembak aparat.

- ❖ *20 April:* 6 orang WNA Malaysia dan 2 WNI dari PT Trillion Abadi Perkasa dan PT Kayu Tropikal Jaya (*perusahaan HPH*), disidangkan di Pengadilan Negeri Manokwari atas tuduhan melakukan penebangan kayu Merbau secara ilegal (*Illegal logging*), karena itu melanggar UU No. 41/1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
- ❖ *25 April:* Peringatan Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke-54 di Ambon menimbulkan bentrokan massal antara kelompok pendukung RMS dan warga yang mendukung NKRI, menewaskan paling sedikit 13 orang dan melukai ratusan warga lainnya.
- ❖ *25 April:* Solidaritas Mahasiswa Papua dan Aceh seJawa-Bali mengadakan aksi demonstrasi di kantor KPU Pusat di Jl. Imam Bonjol, Jakarta menolak hasil Pemilu di Aceh dan Papua karena dianggap pelaksanaan Pemilu di kedua wilayah tersebut penuh dengan kecurangan.
- ❖ *26 April:* Utusan Mahkamah Konstitusi, Dr. Himawan dan seorang stafnya yang melakukan peninjauan ke Manokwari berkaitan dengan gugatan Ketua DPRD Papua terhadap UU No. 45/1999 tentang Pemekaran, disambut aksi demo oleh masyarakat pendukung Provinsi Irija Barat dengan menggelar berbagai spanduk dan pamflet, diantaranya tertulis, "bubarkan Irija Barat sama dengan undang konflik horizontal; pilih pemekaran Provinsi atau Tanah Papua pisah dari NKRI".
- ❖ *27 April:* Hasil penelitian Unicef Perwakilan Papua bekerjasama dengan Puslitkes Univ. Indonesia menunjukkan, 50 % kasus HIV/AIDS pada kelompok usia produktif (15-29 th), 92 % terinfeksi melalui hubungan seks. Hasil ini menunjukkan HIV/AIDS merupakan permasalahan yang mengancam kualitas hidup di Papua.
- ❖ *28 April:* Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil untuk HAM di Papua melakukan aksi demo damai di gedung PBB, Jl. Thamrin Jakarta, menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dengan melibatkan PBB dan pihak internasional lainnya.
- ❖ *28 April:* Direktur RSUD Wamena dr. Viviaya mengatakan, stok obat-obatan di gudang RSUD Wamena hanya mampu melayani pasien yang rawat inap di dua bangsal. Untuk pasien lainnya yang dalam kondisi darurat hanya bisa diberi resep dokter dan pasien bersangkutan membelinya pada apotik umum, mengingat poliklinik rumah sakit sudah ditutup. Dalam suatu keterangan pada tanggal *1 Mei*, dr. Bowo, tenaga dokter spesialis bedah di RSUD Wamena mengatakan, tidak menutup kemungkinan ia dan kawan-kawan tenaga medis lainnya bisa pindah ke daerah lain bila kondisi rumah sakit tersebut masih dililit berbagai masalah seperti yang terjadi belakangan ini.

- ❖ *29 April:* Ketua MUI Papua Drs. H. Zubeir D. Hussein dan Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Herman Awom, S.Th menyatakan keprihatinannya terhadap konflik di Ambon dan mengharapkan aparat pemerintah mengambil langkah untuk segera mengatasinya. Keduanya meminta umat beragama di Papua agar menjaga tali persaudaraan dan tidak terprovokasi dengan konflik Ambon.
- ❖ *30 April:* warga 7 suku asal Teluk Bintuni yang berada di Jayapura dan Elsham Papua mengadakan jumpa pers menanggapi peristiwa penembakan warga di Kampung Mariedi, Teluk Bintuni (*lihat catatan 20 April*). Keterangan Drs. Aloysius Nafurbenan, tidak benar ada kelompok TPN/OPM di wilayah tersebut seperti yang dinyatakan pihak kepolisian, melainkan kelompok sekte/kargo yang dipimpin oleh Menase Furima. Penembakan yang terjadi karena aparat tidak profesional dan tidak bernegosiasi terlebih dahulu dengan warga. Menurutnya, perusahaan HPH Djayanti Group dan lima anak perusahaannya yang beroperasi selama 20 tahun di Teluk Bintuni telah menyengsarakan masyarakat setempat dan merampas hak ulayat masyarakat. Pihaknya meminta perusahaan yang beroperasi di Teluk Bintuni agar dalam menyelesaikan ganti rugi tanah dan hutan adat, harus melibatkan LMA dan semua unsur pemerintahan di tingkat distrik setempat; tidak hanya menggunakan Brimob yang sehari-harinya mengawal perusahaan bersangkutan. Karena itu, pihaknya meminta Polda Papua untuk mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sementara itu Aloysius Renwarin, Direktur Elsham Papua, menyatakan peristiwa penembakan di Kampung Mariedi bukan merupakan tindak kriminal biasa, melainkan sudah tergolong pelanggaran HAM berat.
- ❖ *30 April:* Kapolres Manokwari, Drs. Dedi Kusnadi, menegaskan pihaknya melakukan penjagaan ketat terhadap Menase dan Matius Furima di RSUD Manokwari (dua korban dari peristiwa di Mariedi) dan tidak memperkenankan pihak lain berkunjung karena keduanya berstatus tersangka.
- ❖ *30 April:* Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM di Papua yang terdiri dari unsur adat, agama, tapol/napol, mahasiswa dan ketua-ketua Senat Perguruan Tinggi di Jayapura dalam jumpa persnya di Jayapura menyatakan bahwa 1 Mei dianggap sebagai hari pelanggaran HAM di Papua, maka mereka menolak integrasi Papua ke NKRI. Fred Suebu dari unsur Adat mengatakan menolak penyerahan Papua ke NKRI oleh PBB karena keputusan itu hanya sepihak, tanpa meminta persetujuan dari rakyat Papua. Karena itu permasalahan ini perlu dibahas kembali melalui dialog nasional dan internasional.
- ❖ *30 April:* Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu seluruh usulan pembentukan/pemekaran daerah otonom baru baik kabupaten maupun provinsi, ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Menurut Gubernur, masyarakat di Papua sedang mengusulkan pembentukan 11 kabupaten baru dan 2 provinsi (Provinsi Nuu Eva, dan pengaktifan Irja Tengah) ke pemerintah pusat.

- ❖ *30 April:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa memerintahkan Wakil Bupati Jayawijaya agar segera mencari Bupati David Hubi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Wamena yang mengakibatkan seluruh PNS di Wamena melakukan aksi mogok kerja, menuntut pembayaran gaji, honor dan insentif mereka.
- ❖ *1 Mei:* Y Waisimon, anggota Komisi D DPRD Jayawijaya yang membidangi pembangunan menyatakan penyesalannya terhadap anggota DPRD setempat yang tidak peduli terhadap kondisi Jayawijaya yang sudah parah disana-sini, khususnya dibidang pemerintahan. Mereka hanya sibuk mengurus partainya masing-masing“. Menurutnya, secara nyata anggota DPRD sudah tidak diakui lagi oleh masyarakat, namun secara hukum mereka masih mempunyai hak untuk mengontrol kondisi pemerintahan yang terjadi saat ini.
- ❖ *1 Mei:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa, M.Si memimpin upacara peringatan hari Integrasi Papua kedalam NKRI yang ke-41 yang digabungkan sekaligus dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Dalam upacara tersebut Gubernur menegaskan bahwa proses integrasi Irian Barat ke dalam pangkuan NKRI sudah melalui prosedur yang sah dan demokratis serta telah diterima masyarakat Internasional. Menurutnya, 'hak menentukan nasib sendiri' penduduk Irian Barat telah dilaksanakan melalui PEPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969 dimana hasilnya membuktikan penduduk Irian Barat menyatakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Hasil ini juga telah dikukuhkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 dengan Resolusi No 2504 pada 9 November 1969. Upacara yang sama diadakan juga oleh jajaran Pemda Kotamadya Jayapura di Lapangan Brimob, Kotaraja.
- ❖ *5 Mei:* Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM di Papua melakukan aksi demo damai di halaman kantor DPRD Papua di Jayapura, menuntut diadakannya dialog nasional dan internasional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan status politik Papua.
- ❖ *6 Mei:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa, M.Si membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi mogok kerja yang dilakukan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Wamena dalam dua minggu terakhir. Penyelidikan juga dilakukan terhadap penggunaan dana APBD, Otsus dan APBN oleh Pemda Jayawijaya.
- ❖ *7 Mei:* Sidang kasus pelanggaran HAM berat Abepura Desember 2000 dimulai di Pengadilan HAM di Makassar, menghadirkan terdakwa dari kepolisian yakni, Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing, SH yang saat kejadian masing-masing menjabat sebagai komandan Brimob Polda Papua dan Kapolres Jayapura.
- ❖ *11 Mei:* Bupati Biak Numfor, Yusuf M Maryen, S.Sos mengatakan, sistem pemerintahan yang sentralistik memasung kreativitas pemerintah lokal sehingga upaya pengembangan potensi daerah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lokal. Sistem tersebut juga

menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat. Makanya masih sangat sulit untuk mengubah kultur birokrasi yang ada saat ini di Papua.

- ❖ *12 Mei:* Masyarakat Pegunungan Tengah yang berada di Jayapura mengadu ke DPRD Papua karena tidak banyak anggota legislatif yang berasal dari Pegunungan Tengah karena terbentur nomor urut pada setiap partai. Padahal mereka mendapatkan suara terbanyak, walau berada pada nomor urut terbawah.
- ❖ *12 Mei:* Tim 12 yang dipimpin Micha Ronsumbre yang sedang memperjuangkan pemekaran ibukota Irija Tengah di Biak, diminta oleh Bupati Biak Yusuf Maryen untuk menghormati hukum yang berlaku.
- ❖ *12 Mei:* Himpunan Mahasiswa Jayawijaya yang berada di Jayapura prihatin dengan kondisi RSUD Wamena yang kekurangan obat-obatan, banyak pasien yang tidak tertangani secara medis dengan baik. Ada 11 orang pasien yang terpaksa dievakuasi ke Jayapura dan kini sedang mendapat pengobatan intensif di RS Katolik Dian Harapan, Waena.
- ❖ *12 Mei:* Sekretariat Keadilan & Perdamaian (SKP) Keuskupan Manokwari-Sorong mengumumkan hasil penyelidikannya terhadap kasus penembakan warga Kampung Mariedi, Bintuni kepada pers di Sorong, bersama 7 Kepala Suku dari Teluk Bintuni dan sejumlah mitra. Mereka mengutuk tindakan polisi yang menewaskan 5 warga Mariedi dan meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena dianggap sebagai pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM No. 26/2000 pasal 9. Para Kepala Suku memandang kasus Mariedi merupakan puncak perlawanan masyarakat terhadap Djayanti Group yang sudah lama mengambil kayu, udang dan ikan tanpa membayar kompensasi memadai kepada pemilik ulayat. Masyarakat sudah lama menginginkan PT Djayanti Group keluar dari Bintuni karena merusak lingkungan hidup.
- ❖ *13 Mei:* Dalam lokakarya tentang Isu-Isu Nasional di Gedung Merdeka, Bandung, Kasad Jendral TNI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi perang modern dimana ada negara yang berusaha menghancurkan Indonesia untuk kemudian mengontrolnya. Ada tiga cara yang digunakan: memakai paradigma kolonialisme dengan tujuan, mengubah pandangan dan pola hidup dari suatu negara agar sesuai dengan sistem, nilai dan kepentingan dari negara tersebut. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka akan meningkatkan tekanan dengan membentuk kelompok perlawanan di semua wilayah negara sasaran dengan memanfaatkan isu HAM dan hukum, melakukan diplomasi atau mendirikan kelompok klandestin. Langkah ketiga adalah melakukan invasi secara langsung ke negara target dengan diplomasi intensif untuk mendapatkan pengakuan bahwa intervensinya resmi. Menurut Kasad, dua langkah pertama sudah dilakukan terhadap Indonesia, tanpa menyebut nama negara dimaksud dan apa kepentingannya.

- ❖ *17 Mei:* Walikota Jayapura MR Kambu mengatakan belum cairnya dana Otsus periode 2004 cukup mengganggu pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemda Kota Jayapura.
- ❖ *18 Mei:* Presiden Megawati memperingatkan Pemda kabupaten agar tidak berpikir atau bertindak seolah-olah otonomi daerah yang diberlakukan di daerahnya sama seperti suatu negara kecil sehingga dapat melakukan apa saja tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat.
- ❖ *18 Mei:* Dalam inspeksinya ke wilayah-wilayah pinggiran kota Wamena, Wakil Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom, S.Sos menemukan banyaknya Sekolah Dasar yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Gedung rusak dan terlantar sehingga anak-anak melangsungkan proses belajarnya di rumah guru atau balai desa. Tiadanya fasilitas belajar-mengajar dan kebanyakan guru tidak aktif mengajar bahkan meninggalkan tempat tugas. Inspeksi mendadak ini difokuskan di Distrik Asologaima setelah dilaporkan adanya penyalahgunaan dana dalam pembangunan gedung beberapa SD di Distrik tersebut pada 2003. Fakta ini terjadi di pinggiran kota Wamena, bagaimana dengan wilayah yang lebih jauh dan terisolir!
- ❖ *18 Mei:* Adanya aspirasi masyarakat Timika, Nabire dan Biak yang belakangan ini ingin menjadikan wilayahnya sebagai ibukota Provinsi Irija Tengah, dihargai oleh Gubernur Papua Drs. JP Solossa, M.Si. Namun ia menyayangkan bila aspirasi yang mengatasnamakan rakyat tersebut digerakkan oleh orang tertentu yang hanya berambisi mengejar jabatan.
- ❖ *19 Mei:* Gubernur Provinsi Irija Barat, Abraham O. Atururi, melakukan kunjungan kerja selama 3 hari ke pulau-pulau terpencil disekitar Kabupaten Raja Ampat, Sorong, dalam rangka mensosialisasikan keberadaan provinsi baru tersebut. Warga setempat secara meriah menyambut kunjungan ini.
- ❖ *21 Mei:* KPU Provinsi Papua mengumumkan 56 orang anggota legislatif Provinsi Papua hasil Pemilu Legislatif 5 April yang berasal dari 21 partai politik. Perinciannya sbb: Golkar 16 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 6 kursi, Partai Damai Sejahtera (PDS) 6 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 3 kursi, Partai Persatuan Daerah (PPD) 3 kursi, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) 2 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 2 kursi, Partai Penegak Demokrasi Indonesia 2 kursi, dan 1 kursi masing-masing untuk PNI Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Merdeka, Partai Patriot Pancasila, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Dari 56 orang tersebut, 35 orang diantaranya adalah asli Papua.

- ❖ *23 Mei:* Ketua Dewan Adat Papua Tom Beanal menyatakan kecewa atas kunjungan 2 jam Presiden Megawati ke Timika yang tidak disertai dialog terbuka dengan masyarakat setempat. Ia mempertanyakan pertemuan tertutup yang diadakan di Bandara Moses Kilangin Timika, dimana dalam pertemuan tersebut sejumlah warga yang hadir mengajukan tuntutan supaya pemerintah mempercepat pemekaran Irja Tengah. Tegasnya bahwa Dewan Adat menolak keras pemekaran Irja Tengah yang telah menimbulkan konflik antar warga. Ia juga mempertanyakan penyerahan hak ulayat atas tanah adat dari masyarakat Kokonao (Mimika) seluas 90 Ha kepada Menakertrans Jakob Nuwawea untuk keperluan transmigrasi oleh Kepala Suku Kamoro Yohanes Kapiyau. Ia kuatir penyerahan tersebut akan menimbulkan konflik antar marga pemilik ulayat (*Taparu*) di kemudian hari.
  
- ❖ *23 Mei:* Ketua DPRD Biak Numfor Hengky Sadsoeitoeboen meminta DPRD setempat terlibat dalam penanganan dua kapal penangkap ikan ilegal yang menggunakan bahan kimia di perairan Supiori oleh TNI-AL. Hal ini karena adanya kekuatiran warga jika proses penyelidikan tersebut tidak bisa dituntaskan mengingat pemilik kapal disinyalir sebagai binaan TNI-AL. Ia meminta ijin operasi dari kedua kapal supaya dicabut.
  
- ❖ *24 Mei:* Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran HAM berat Abepura di Pengadilan HAM Makassar, Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Daud Sihombing, SH yang dihadirkan sebagai terdakwa, saat membacakan eksepsinya menyatakan bahwa warga sipil-lah yang melakukan pelanggaran HAM berat, bukan dirinya. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara, menyerang Polsek Abepura secara terencana, sistematis, dan meluas termasuk menyerang warga sipil lainnya. Ia menolak dakwaan jaksa yang menyatakan dirinya melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini dan meminta persidangan HAM tersebut tidak dilanjutkan. Penasehat Hukum para terdakwa, Deny Kailimang, SH menolak tuduhan jaksa penuntut dan menilai kasus Abepura sebagai kasus kriminal murni.
  
- ❖ *25 Mei:* Warga kota Jayapura resah akibat sering padamnya aliran listrik karena dapat menyebabkan rusaknya sejumlah barang elektronik yang menggunakan aliran listrik dan juga mahalnya pembayaran rekening. Beberapa warga meminta PLN Jayapura menjelaskan alasan seringnya dilakukan pemadaman listrik tersebut.
  
- ❖ *25 Mei:* Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Bagus Sukaswara, menyatakan pihaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap masalah yang terjadi di RSUD Abepura seperti tunggakan tagihan listrik hingga belum terbayarnya insentif petugas medis sejak November 2003. Alasannya, saat ini struktur rumah sakit berada dibawah kewenangan Gubernur.
  
- ❖ *26 Mei:* Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya di Jayapura melakukan unjuk rasa ke kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura. Di depan Gubernur JP Solossa, mereka menuntut Pemda Provinsi mengusut tuntas kekacauan pemerintahan dan penyalahgunaan keuangan yang saat ini terjadi di Pemda Jayawijaya. Mereka juga

menuntut agar aparat Polri/TNI tidak melindungi “*politisi busuk dan koruptor*” di Jayawijaya.

- ❖ *26 Mei*: Walaupun menempa banyak kritikan dan protes dari masyarakat atas kinerjanya dalam melaksanakan Pemilu Legislatif 4 April lalu, KPU Irja Barat akhirnya menetapkan 44 orang anggota DPRD Provinsi Irja Barat terpilih. Partai Golkar keluar sebagai pemenang dengan merebut 13 kursi.
- ❖ *26 Mei*: Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Dedi Kusnadi menegaskan, pihaknya telah menjatuhkan hukuman indisipliner kepada 11 orang polisi yang terlibat dalam peristiwa penembakan warga Mariedi, Teluk Bintuni 20 April silam.
- ❖ *27 Mei*: Untuk membayar kenaikan tunjangan PNS di Papua yang dinamakan “gaji bulan ke-13” sebagaimana diputuskan pemerintah, Pemda Provinsi Papua menyiapkan dana sebesar Rp 12,3 Milyar dari sumber Dana Alokasi Umum Papua yang dianggarkan pemerintah pusat.
- ❖ *27 Mei*: Duta Besar Jerman untuk Indonesia Dr. Gerhard Fuldam berkunjung ke Jayapura dalam rangka menyerahkan bantuan proyek olahraga Jerman-Indonesia bagi Provinsi Papua hingga tahun 2005, diterima oleh Gubernur JP Solossa.
- ❖ *27 Mei*: Polres Jayawijaya menyita puluhan botol minuman keras ilegal yang dipaketkan ke Wamena melalui Kantor Pos dan Giro. Pada paket tidak dituliskan alamat penerima dan pengirim.
- ❖ *27 Mei*: Menanggapi keluhan warga Jayapura atas seringnya PLN memadamkan aliran listrik dengan mendadak, Kepala PLN Cabang Jayapura I Wayan Udayana mengajukan permintaan maaf. Menurutnya, pemadaman itu dilakukan dalam rangka pemeliharaan mesin pembangkit listrik yang umumnya sudah tua.
- ❖ *27 Mei*: Kakanwil Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Jerry Haurissa, SE, MM mengatakan hingga saat ini Papua masih kekurangan sekitar 27.000 orang guru MIPA dan Bahasa Inggris untuk SMP hingga SMU.
- ❖ *27 Mei*: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama pemerintah meminta dukungan dari DPR RI untuk mengusir Sidney Jones dari Indonesia. Sementara Menlu Hasan Wirajuda mengatakan kepada pers dan aktivis partai politik di Jakarta bahwa beberapa laporan ICG bias tentang Pemerintah Indonesia. Tanggapan dari Pimpinan ICG di Brussels, Gareth Evans yang juga mantan Perdana Menteri Australia, pengusiran terhadap Sidney akan menghancurkan reputasi Indonesia sendiri.
- ❖ *30 Mei*: 5 orang anggota Panwaslu Provinsi Irja Barat yang telah dilantik di Jakarta, mulai melakukan persiapan Pemilu Presiden 5 Juli mendatang dengan menggelar pelatihan

Panwaslu Kabupaten/Kota se-Irja Barat. Menurut ketuanya, Ismail Ghonu, SH, pihaknya juga akan memproses banyaknya tindak pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 5 April lalu di Irja Barat yang belum ditangani hingga saat ini.

- ❖ *30 Mei:* Direktur Umum PDAM Wilayah Papua H. Omar, BA menyatakan, sekitar 30 % dari total 2,5 juta (750.000 jiwa) penduduk Papua yang tinggal di perkotaan dan memiliki akses pada pelayanan air bersih dari PDAM, hanya 15 % diantaranya (sekitar 115.000 jiwa) yang benar-benar mendapat pelayanan air bersih karena beberapa faktor: minimnya sumber air bersih dan daya jangkau PDAM, struktur tarif yang rendah dibanding biaya operasional, rendahnya efisiensi PDAM, dll.
- ❖ *1 Juni:* Dalam uraian di harian *Papua Post* berjudul “Menciptakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Tepat Sasaran Dalam Rangka Otonomi Khusus di Papua, Pandangan Pemerintah dan Ornop di Papua”, hasil kerjasama ICS dan CSSP-USAID Jakarta, Christine Ansanay dari Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua menyatakan, hingga kini Papua masih menghadapi tiga masalah utama kesehatan yakni, tingginya angka penderita penyakit malaria, tubercolosis (TBC) dan HIV/AIDS. Ketiganya masih ditambah dengan rendahnya gizi warga yang menyebabkan tingginya kesakitan dan kematian penduduk sehingga menurunkan usia harapan hidup masyarakat Papua. Misalnya, usia harapan hidup di Papua pada tahun 2001 hanya mencapai 55 tahun.
- ❖ *1 Juni:* Menyikapi semakin ‘bobroknya’ disiplin kerja PNS di lingkungan Pemda Provinsi Papua, dibentuk satu tim khusus yang bertujuan mengkaji masalah ini untuk selanjutnya dibuat suatu peraturan khusus. Menurut Sekda Provinsi Papua Drs. Decky Asmuruf, PNS di Papua kelihatannya hanya bekerja untuk mendapatkan gaji, ketimbang bertugas melayani masyarakat. “Perlu diteliti apakah hal ini disebabkan karena tidak ada pekerjaan, atau jumlah PNS yang terlalu banyak dibanding ketersediaan pekerjaan, atautkah karena mental PNS tersebut sendiri”, kata Sekda.
- ❖ *3 Juni:* Sekda Provinsi Papua Drs. Decky Asmuruf menyatakan terhambatnya pencairan dana Otsus menyebabkan macetnya proyek-proyek tahun anggaran 2004 di Provinsi Papua, terutama yang dibiayai dari dana Otsus. Keterlambatan ini juga menyebabkan sejumlah kabupaten di Provinsi Papua mengalami krisis keuangan, seperti situasi yang terjadi di Wamena saat ini, mengingat sebagian besar kabupaten/kota di Papua hanya mengandalkan pembiayaannya dari APBD.
- ❖ *4 Juni:* Sekda Provinsi Papua Drs. Decky Asmuruf dilantik menjadi Staf Ahli Mendagri bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan di Jakarta.
- ❖ *4 Juni:* Dalam kampanyenya di Jayapura, Capres/Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berjanji bila akan terpilih dalam Pemilu Presiden Juli mendatang, akan mempertahankan Otsus di Papua. Keduanya meminta pemerintah daerah di Papua harus jujur dalam menggunakan dana Otsus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- ❖ *6 Juni*: Dewan Adat Papua dari berbagai daerah yang berkumpul di Jayapura, dipimpin oleh ketuanya Tom Beanal, mengadakan pertemuan dengan calon anggota DPRD Provinsi Papua yang baru terpilih dalam Pemilu Legislatif 5 April lalu. Dalam pertemuan, Dewan Adat menyampaikan harapannya agar anggota yang baru ini dapat membawa perubahan dalam lembaga legislatif tersebut, lebih aspiratif terhadap kebutuhan rakyat dan tidak menjadi *bos-bos* KKN baru.
- ❖ *6 Juni*: Sidney Jones, pimpinan International Crisis Group (ICG) Jakarta, akhirnya meninggalkan Jakarta/Indonesia setelah visanya tidak lagi diperpanjang oleh pihak imigrasi Indonesia. Hal ini berawal dari tuduhan BIN bahwa Sidney dan organisasinya sering mengeluarkan laporan yang menjelek-jelekkan Indonesia sehingga ICG dimasukkan dalam daftar organisasi internasional yang gerak-geriknya perlu diwaspadai di Indonesia. Tindakan pemerintah pusat dalam hal ini mendapat sorotan tajam dalam media nasional maupun internasional, dan dinilai sebagai suatu kemunduran dalam proses demokratisasi di Indonesia. Kepada pers di Jakarta pada tgl. *17 Juni*, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono menyatakan, anggota masyarakat dan organisasi dalam negeri Indonesia yang membela keberadaan Sidney Jones dan organisasinya (ICG) di Indonesia, merupakan pihak yang 'makan' dana pihak asing untuk merusak Indonesia. Karena Sidney dinilai jelas-jelas sudah merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.
- ❖ *7 Juni*: Pembunuhan yang menewaskan seorang warga Damal ditangan seorang Nduga di Kuala Kencana Timika, memicu perkelahian massal antar kedua suku di Timika yang akhirnya menewaskan lagi 3 orang dan melukai 98 warga lain dari kedua kelompok yang bertikai, termasuk anggota polisi. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Timbul Silaen menyatakan bentrok massa di Timika ini sebaiknya diselesaikan secara adat daripada menggunakan aturan hukum positif yang berlaku.
- ❖ *7 Juni*: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Jigi Jigibalom dan Tenius Murib yang tertangkap dalam operasi TNI di Bolakme 5 Juni 2003, kelanjutan operasi pasca pembongkaran gudang senjata Kodim Wamena 4 April 2003, diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Wamena kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian disidangkan. Kedua tersangka didakwa dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana makar.
- ❖ *8 Juni*: Tujuh (7) SD di Merauke tidak dapat mengadakan Ujian Akhir Nasional yang berlangsung sejak 7 Juni di seluruh Indonesia, disebabkan tiadanya murid kelas VI dan tiadanya guru yang menyebabkan kegiatan belajar-mengajar terhenti begitu lama. Hal ini menurut keterangan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Drs. Beny J. Ohoilulin.
- ❖ *8 Juni*: Dua kapal penangkap ikan berbendera China, Fu Yuan Yu 511 dan Fu Yuan Yu 512 milik PT Pusaka Bahari yang berkantor di Ambon ditangkap oleh pihak berwajib di perairan Merauke. Kedua kapal diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 9/1985

tentang Pokok-Pokok Perikanan berupa, menarik satu jaring dengan menggunakan dua kapal sekaligus.

- ❖ *9 Juni:* Tony Uloli, Ketua Umum Kadinda Provinsi Papua menganjurkan para pengusaha di Papua agar tidak terus-menerus bergantung pada proyek pemerintah yang bersumber pada dana APBN dan APBD, tetapi mengembangkan usaha investasi industri yang bersumber pada sektor riil sehingga dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi di Papua yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ketergantungan pada proyek Pemda, menurutnya berdampak buruk disaat dana Otsus terlambat cair seperti sekarang; menyebabkan banyak usaha dagang sepi dan akhirnya bisa tutup dan menyebabkan PHK dimana-mana akibat rendahnya daya beli masyarakat.
- ❖ *10 Juni:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa menyatakan, dana Otsus tahun 2004 telah dicairkan untuk triwulan pertama sekitar 15 % atau sebesar Rp 220 milyar. Menurutnya keterlambatan pencairan dana Otsus bukan disebabkan oleh adanya tuntutan pembagian dari Provinsi Irija Barat, melainkan pada proses administrasi di tingkat pemerintah pusat dan dikarenakan belum adanya laporan penggunaan dana Otsus sebelumnya dari kabupaten-kabupaten kepada Mendagri.
- ❖ *11 Juni:* Dance Kbarek dari Dewan Adat Biak mengecam keras sikap arogan anggota Brimob yang ditugaskan di Polres Biak, yang memukul seorang warga Biak bernama Boy dan Kepala Distrik Biak Kota Johannes Sopacua hingga luka serius dan menjalani perawatan di RSUD Biak. Pemukulan ini memicu banyak protes dan demonstrasi dari masyarakat kota Biak.
- ❖ *11 Juni:* 5 anggota KPU Kota Sorong dijadikan tersangka oleh Polres Sorong karena dituduh melanggar UU Pemilu No. 12/2003 berupa, memanipulasi jumlah suara yang diperoleh beberapa partai politik dalam Pemilu 5 April di wilayah tersebut.
- ❖ *11 Juni:* Keterangan dari dr. Maurits Okoseray, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, ibu rumah tangga di Timika merupakan kelompok penderita HIV/AIDS terbesar (130 orang dari total 581 kasus), disusul petani (103 orang) dan para pekerja seks (100 orang).
- ❖ *14 Juni:* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui putusan No. 17/G.TUN/2004/PTUN, membatalkan Keppres No. 213/M/2003 tentang pengangkatan Abraham O Atururi sebagai Pejabat Gubernur Irija Barat. Dalam putusan tersebut, Presiden RI diperintahkan untuk mencabut Keppres tersebut.
- ❖ *14 Juni:* Majelis Hakim kasus pelanggaran berat HAM Abepura dalam putusan sela di Makassar menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa Brigjen (Pol) Johny Wainal Usman dan Kombes (Pol) Daud Sihombing dan menyatakan sidang tetap dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi pada dua pekan mendatang.

- ❖ *15 Juni:* Pertikaian massal antar Suku Damal dan Nduga yang berlangsung sejak 7 Juni di Timika, akhirnya berdamai atas fasilitasi dari pihak kepolisian. Decky Murib, salah seorang saksi kunci dalam gugatan Pangdam XVII/Trikora melawan Elsham Papua dalam delik penghinaan terhadap Kodam Trikora oleh Elsham, disebut-sebut sebagai 'panglima perang' dari Suku Nduga yang terlibat dalam pertikaian berdarah ini.
- ❖ *15 Juni:* Bupati Merauke Jhon Gluba Gebze meresmikan dua pos keamanan di Kampung Yowit dan Kampung Kali Buraka, Distrik Okaba. Menurut Bupati, keberadaan kedua pos keamanan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di wilayah itu, seperti peristiwa penyerangan yang terjadi di Kampung Yowit 3 April lalu yang disinyalir dilakukan oleh kelompok yang ingin merdeka.
- ❖ *16 Juni:* Praktisi hukum di Jayapura, Anthon Y. Raharusun, SH menanggapi putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres 213/M/2004 tentang pengangkatan Abraham Atururi sebagai Pejabat Gubernur Irja Barat. Keputusan ini sangat sulit untuk diterapkan di lapangan mengingat pemekaran provinsi tersebut sarat politik. Maka, dibutuhkan kebesaran hati pejabat yang bersangkutan untuk mematuhi keputusan hukum tersebut; atau bahkan sebaliknya semakin memupuk kelompok resisten di masyarakat.
- ❖ *22 Juni:* Menurut mantan Gubernur Irja Izaak Hindom, program transmigrasi merupakan cara yang bermanfaat untuk memotifasi pembangunan di daerah penerima. Ia mencontohkan Kabupaten Merauke yang selama ini menjadi sentra penempatan transmigrasi khususnya dari pulau Jawa. Sementara berlawanan dengan kenyataan di lapangan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebagian besar warga trans telah meninggalkan lokasi dan mencari hidup di kota Merauke yang dianggap lebih menguntungkan.
- ❖ *23 Juni:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa mensinyalir banyak bupati dan walikota, terutama dari kabupaten pemekaran yang sering meninggalkan tugas dan melakukan perjalanan keluar Papua dengan alasan, mencari investor untuk daerahnya. Namun tak satupun investor yang dibawa ke daerah ini, kata Gubernur.
- ❖ *24 Juni:* Gubernur Papua Drs. JP Solossa mengatakan, dari daftar calon anggota legislatif provinsi dan kabupaten hasil Pemilu legislatif lalu, banyak yang tidak berkualitas sehingga Pemda Papua akan menyediakan anggaran khusus bagi pendidikan anggota legislatif setelah mereka menduduki jabatannya.
- ❖ *24 Juni:* Jaksa Agung Amerika Serikat, John Ashcroft, saat mengumumkan hasil penyelidikan FBI terhadap kasus penembakan guru sekolah internasional PT Freeport pada 30 Agustus 2002 lalu, menuduh Anthonius Wamang, seorang warga Amungme di Timika sebagai pelaku penembakan tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa "Pemerintah Amerika Serikat bertekad memerangi dan menghukum para teroris yang

membahayakan warga Amerika Serikat yang tidak berdosa, baik di kota-kota besar maupun di kutan belantara dunia”.

- ❖ *24 Juni:* Juru bicara Deplu RI, Martin Natalegawa menyatakan dengan adanya pengumuman dari Jaksa Agung Amerika Serikat mengenai penembakan warga AS di Timika Agustus 2002 yang membuktikan tiadanya keterlibatan militer Indonesia (TNI), mengharapkan agar Pemerintah Amerika Serikat dapat memulihkan kembali kerjasama militer dengan Indonesia. Hal yang sama ditegaskan juga oleh Duta Besar AS Ralph Boyce di Jakarta yang memuji keberhasilan kerjasama penyelidikan kasus tersebut antara FBI dan aparat keamanan Indonesia.
- ❖ *25 Juni:* Dalam rangka pemeriksaan gugatan DPRD Provinsi Papua terhadap UU No.45/1999 tentang Pemekaran Wilayah pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, salah satu anggotanya, Jimly Asshidique berkunjung ke Papua dan bertemu dengan Pimpinan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di Jayapura. Dalam pertemuan, Socrates Sofyan Yoman mewakili PGGP mengatakan, situasi di Papua akan semakin kacau jika Jakarta lalai atau terus menunda pelaksanaan Otonomi Khusus. Gereja-gereja juga tidak bisa tinggal diam terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Papua. Jimly Asshidique menjelaskan, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan DPRD Provinsi Papua, namun ia mengaku isunya lebih politis daripada sebuah kasus hukum, sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua perlu membicarakan bersama konsekuensi politik dari pelaksanaan pemekaran provinsi di Papua.
- ❖ *25 Juni:* Direktur Administrasi Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI Oentarto Sindung Mawardi mengatakan, pemerintah terus melangkah ke depan dengan rencana membagi Papua kedalam 3 provinsi dan secepatnya mengeluarkan peraturan tentang MRP yang wewenangnya sudah direvisi.
- ❖ *26 Juni:* Sebuah lembaga HAM di Amerika, the Robert F. Kennedy (RFK) Memorial Center for Human Rights melayangkan surat yang isinya mempertanyakan pengumuman Jaksa Agung AS yang menuduh Anthonius Wamang, anggota OPM sebagai pelaku penembakan di Timika Agustus 2002. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa OPM yang dituduh sebetulnya memiliki peralatan militer dan senjata yang minim; lokasi penembakan sebetulnya dibawah kontrol TNI sehingga tidak memungkinkan pihak luar bisa memasuki wilayah tersebut, kecuali atas kerjasama dengan TNI; peristiwa tersebut terjadi dekat pos TNI, namun pasukan TNI baru mendatangi lokasi kejadian setelah peristiwa berakhir; dan hasil penyelidikan kepolisian di Papua setelah kejadian menunjukkan adanya keterlibatan TNI.
- ❖ *27 Juni:* Weinand Watory, Ketua Koalisi Pembaruan Papua yang beranggotakan 34 caleg terpilih hasil Pemilu 5 April dari 17 Parpol untuk DPRD Provinsi Papua menyatakan, tidak etis kalau anggota DPRD Provinsi Papua yang ada saat ini meminta Pemda membayar

lagi pesangon yang besar diakhir masa tugas, mengingat selama menjadi anggota DPRD mereka sudah menerima gaji, tunjangan, dan bonus-bonus yang cukup banyak.

- ❖ *27 Juni:* Ketua DPRD Papua Drs. John Ibo menyatakan pihak-pihak yang menghasut rakyat untuk tidak ikut Pemilu sebagai tindakan separatis.
- ❖ *29 Juni:* Pernyataan ALDP di Jayapura tentang pelaku tindak penyiksaan dalam beberapa kasus kekerasan di Demta, Wamena dan Wasior, Papua yang didominasi oleh TNI dan Polri, dinilai *ngawur* dan tidak berdasarkan bukti oleh pihak Polda Papua dan Pangdam Trikora.
- ❖ *30 Juni:* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang dipimpin Hakim Ketua Ebo Maulana, SH memenangkan gugatan Kodam XVII/Trikora melawan Elsham Papua untuk kasus penembakan di Timika 2002. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Kodam, memerintahkan tergugat (Elsham) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 50 juta (*dari tuntutan semula Rp 50 Milyar*) dan menyatakan permohonan maaf di RCTI dan TVRI serta Kompas dan Media Indonesia (*tuntutan semula: permintaan maaf dimuat di 5 koran dan 5 TV nasional*).
- ❖ *30 Juni:* Ir. Weinand Watori, Ketua Koalisi Pembaharuan Papua DPRD Provinsi Papua meminta semua pihak tidak perlu khawatir dengan terbentuknya Koalisi tersebut. Menurutnya, Koalisi ini bertekad memperjuangkan kondisi yang baru di DPRD seperti, akan memprakarsai pembahasan APBD yang melibatkan semua komponen masyarakat seperti adat, agama, perempuan, mahasiswa, dsb.; mendesak agar Otsus diberlakukan di tingkat Kabupaten, bukan di provinsi seperti yang terjadi selama ini. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Papua saat ini Drs. John Ibo, menanggapi dingin keberadaan Koalisi Parpol tersebut. Ia meminta Koalisi menaati tata aturan dewan yang ada.

#### Lampiran (7 April)

PERNYATAAN Sebelas denominasi Gereja di Wamena seusai merayakan 'masuknya Injil ke wilayah Jayawijaya 50 tahun yang lalu' :

1. Sebelas denominasi gereja yang berada di Pegunungan Tengah menyatakan menolak kehadiran agama non-Kristen yang tidak memiliki basis umat di Pegunungan Tengah untuk mengembangkan misinya dengan mempengaruhi masyarakat Pegunungan Tengah dengan cara apapun;
2. Mendesak Pemda Jayawijaya dan pengurus Islam untuk menutup Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amal Ilmiah (STIA), pesantren di Hitigima, Wamena, karena merupakan tempat peletakan Injil pertama kali di Lembah Baliem. Dan melarang pembangunan mesjid-mesjid di kampung-kampung di Pegunungan Tengah, mengingat pengalaman gereja Kristen di basis-basis Islam di Indonesia dimana gereja mengalami kesulitan untuk membangun gereja atau lembaga pendidikan Kristen;
3. Mendesak Pemda Tolikara, Yahokimo, Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang untuk tidak memberikan kesempatan/izin untuk membangun mesjid dan pesantren-

pesantren atau sejenisnya, sebelum mendapat ijin/rekomendasi dari lembaga-lembaga gereja dan masyarakat yang ada, sebagaimana yang lazim berlaku di daerah lain di Indonesia;

4. Mendesak Bupati Jayawijaya menggantikan nama-nama pejabat berikut: Drs. AR Djumati, Drs. Daniel Mandowen, Kondar Siregar, Hasan Abdul Kadir (Ka. Perhubungan), Maskur Adam, Soedarno (Pimpinan CV Anewu), John Banua (Pimpinan PT SPK), Rudy Souissa, SE dan dr. Yohanes Sumarto;
5. Meminta Gereja-Gereja harus bekerja sama dengan denominasi Gereja yang sudah ada di suatu kabupaten di Pegunungan Tengah dan harus dapat menyesuaikan diri dan bekerja sama berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh gereja yang telah ada untuk membangun suatu kekuatan;
6. Meminta Bupati (Jayawijaya) untuk melaksanakan poin-poin pernyataan ini karena berpotensi menimbulkan konflik antar etnis dan agama di Jayawijaya kini dan dimasa mendatang.

## BAGIAN II

### URAIAN PERKEMBANGAN SITUASI PAPUA PERIODE APRIL-JUNI 2004

Dinamika sosial kemasyarakatan dalam bulan April hingga Juni 2004 sebagaimana tercatat pada kronologi peristiwa yang ada di bagian pertama dari uraian aktual ini, akan menjelaskan beberapa pokok yang menentukan gambaran suasana di Papua, sebagai berikut :

1. Aspek Politik dan Keamanan;
2. Aspek Pemerintahan: Pemekaran, Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Pemilihan Umum di Papua;
3. Aspek Penegakan Hukum;
4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
5. Aspek Gerakan Masyarakat Sipil; dan
6. Aspek Perkembangan di tingkat Nasional dan Internasional;

#### 1. Aspek Politik dan Keamanan

Suasana politik dan keamanan di Papua selama tiga bulan ini, dapat diamati dari peristiwa-peristiwa keamanan yang terjadi di Papua, namun juga tidak terlepas dari pengaruh berbagai pernyataan dan kebijakan dari pemerintah yang diputuskan di tingkat nasional (Jakarta) dan diterapkan di Papua. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Papua Aktual Bulan Januari-Maret 2004<sup>1</sup>, menjelang pelaksanaan kampanye Pemilu, telah diwarnai dengan berbagai pernyataan dari pimpinan militer baik di daerah maupun di tingkat nasional yang memberi kesan bahwa Pemilu di Papua akan dikacaukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan Pemilu dilangsungkan di wilayah ini. Asumsi ini kemudian menjadi dasar penambahan dan penempatan pasukan TNI di Papua pada kurun waktu tersebut.

Namun perkiraan-perkiraan tersebut diatas rupanya tidak terbukti bila mengamati jalannya kampanye berbagai partai politik yang berlangsung aman di seluruh Papua. Maka, menjelang pelaksanaan Pemilu lahirlah beberapa peristiwa kekerasan di sejumlah lokasi seperti, penyerangan terhadap petugas pelaksana dan pengawas Pemilu oleh kelompok tak dikenal di Kampung Yowit, Distrik Okaba, Merauke yang kemudian melahirkan berbagai pernyataan yang membenarkan asumsi adanya 'gangguan' selama pelaksanaan Pemilu di Papua. Percikan peristiwa tersebut rupanya menjadi salah satu alasan untuk mendirikan suatu pos keamanan di daerah terpencil ini.

Sedangkan peristiwa kekerasan yang terjadi di Teluk Bintuni (Kampung Mariedi, Distrik Fafuruar) lebih menggambarkan pola penerapan sistem keamanan di Papua berupa, terlibatnya aparat keamanan dalam mengamankan segala aktivitas pebisnis besar yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan, perikanan dan kehutanan. Aparat kepolisian dan TNI yang ditugaskan lembaganya untuk menjaga perusahaan-perusahaan semacam ini kerap kali bertabrakan dengan kepentingan masyarakat pemilik Hak Ulayat yang menuntut kompensasi atas hak ulayatnya kepada perusahaan bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Uraian ini dapat dibaca dalam: [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

Di Timika, terjadi bentrokan massal antara Suku Damal dan Suku Nduga yang bermula dari peristiwa kriminal yang menewaskan warga salah satu suku. Sayangnya bahwa aparat penegak hukum terkesan membiarkan peristiwa ini berkembang sebagai suatu "perang suku" yang kemudian menewaskan lagi beberapa warga dan melukai puluhan lainnya tanpa mengambil suatu tindakan hukum untuk mengatasi perkelahian massal ini. Mengingat faktor pemicunya tergolong sebagai suatu tindak pidana, semestinya aparat kepolisian setempat dapat langsung menanganinya.

## 2. Aspek Pemerintahan

Catatan pada bagian ini diwarnai dengan adanya gerakan dari beberapa kelompok warga yang menuntut pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali Provinsi Irija Tengah yang keberadaannya ditunda sejak terjadinya bentrokan massal di Timika pada Agustus 2003 setelah pendeklarasian provinsi itu. Tidak begitu jelas siapa atau pihak mana yang berada dibalik gerakan ini. Yang jelas, tuntutan tersebut disuarakan ditengah sedang berlangsungnya proses *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, Jakarta terhadap UU No.45/1999 tentang Pemekaran Wilayah di Papua yang diajukan oleh DPRD Provinsi Papua. Selain itu masyarakat di wilayah selatan Papua juga tidak ketinggalan untuk mengajukan tuntutan yang sama agar daerahnya dimekarkan menjadi provinsi tersendiri. Suatu tuntutan yang memang diajukan sejak dua tahun silam. Semua tuntutan pemekaran ini senantiasa mengatasnamakan masyarakat yang sebetulnya tidak tahu-menahu dengan isi tuntutan itu sendiri.

Dalam hiruk-pukuk pemekaran provinsi yang menimbulkan konflik itu, setidaknya terdapat suatu kejelasan hukum pada akhir Juni 2004 ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan DPRD Provinsi Papua terhadap Keppres No.213/M/2003 tentang Pengangkatan Abraham Atururi sebagai Pejabat Gubernur Irija Barat sehingga dengan sendirinya jabatan tersebut ditiadakan demi hukum. Namun demikian, persoalan mendasar berupa pertentangan hukum antara Inpres 1/2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi yang menjadi dasar diresmikannya Provinsi Irija Barat dan UU No. 21/2001 tentang Otsus di Papua belum mendapatkan suatu penyelesaian hukum yang tuntas. Pertentangan ini ditambah lagi dengan putusan PTUN tersebut diatas, membuat status hukum Provinsi itu menjadi semakin tidak menentu. Disisi lain, efektifitas putusan PTUN tersebut di lapangan masih menjadi pertanyaan besar. Karena itu, masalah panjang konflik tata hukum ini, selain dari aspek politik tentunya.

Aktivitas pemerintahan, khususnya di Provinsi Papua juga masih diwarnai dengan Otonomi Khusus yang terus menjadi bahan diskusi dimana-mana, terutama pada jajaran elit pemerintahan daerah. Namun Otsus yang dibicarakan dalam awal tahun 2004 ini terlihat masih saja berkisar pada DANA; dan bukan memunculkan suatu program konkrit yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat. Para pejabat sibuk meributkan dana Otsus tahun 2004 yang belum juga dicairkan oleh pemerintah pusat, namun belum ada suatu penjelasan yang memadai kepada rakyat, apa yang menjadi alasan pemerintah pusat menunda pencairan dana Otsus tersebut. Apakah hal itu menyangkut ketersediaan dana di pemerintah pusat ?, berkaitan dengan sistem administrasi yang diberlakukan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana Otsus?, ataukah berkaitan dengan aspek

pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana Otsus periode sebelumnya oleh pemerintah daerah! Masyarakat Papua sendirilah yang dapat menilai hal ini dengan mengamati perilaku aparat pemerintah daerah dalam era Otsus yang terkesan 'naik status kesejahteraannya'. Kekacauan penyelenggaraan pemerintahan di Wamena akibat tiadanya dana operasional dapat menjadi salah satu contoh dari kekacauan pemanfaatan dana-dana di masa Otsus dewasa ini.

Aspek pemerintahan lainnya yang juga menyita perhatian publik dalam kurun waktu tersebut adalah proses pelaksanaan Pemilu legislatif pada 5 April yang diwarnai penundaan disana-sini akibat terlambatnya pengiriman logistik Pemilu, terutama ke daerah-daerah pedalaman; juga sejumlah catatan seputar berbagai jenis pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu. Namun demikian, tidak terlalu jelas langkah penyelesaiannya oleh pihak berwenang. Perhatian masyarakat juga tersita dengan pengumuman anggota legislatif terpilih, baik di tingkat provinsi maupun di wilayah kabupaten dan kota.

Catatan khusus menyangkut bagian ini adalah untuk pertama kalinya Pemilu di wilayah Papua berlangsung dalam dua wilayah administratif provinsi yang berbeda: Provinsi Papua dan Irija Barat. Jika di Provinsi Papua relatif lebih siap dalam menjalankan Pemilu, Pemilu di Irija Barat justru diwarnai dengan tertundanya pelaksanaan Pemilu di hampir sebagian besar wilayah. Kekacauan ini sebetulnya sudah berawal dari proses-proses persiapan Pemilu dimana hampir semua calon anggota legislatif tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Irija Barat yang dipilih dalam Pemilu 5 April, penetapannya tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi yang baik akibat belum terbentuknya KPU dan Panwaslu di wilayah tersebut. Kedua lembaga pelaksana Pemilu ini baru terbentuk menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 5 April sehingga berbagai tahap persiapan Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya<sup>2</sup>. Menjadi jelas bahwa semua kekacauan ini berawal mula dari kerancuan tata hukum yang bersumber dari pelaksanaan pemekaran provinsi Irija Barat sendiri. Selain masalah prosedural, para anggota yang telah terpilih, khususnya bagi anggota DPRD provinsi dan mereka yang terpilih mewakili Irija Barat di DPR Pusat, juga anggota DPD, nasib mereka sangat ditentukan oleh keabsahan Provinsi Irija Barat.

### **3. Aspek Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang terlihat dalam kurun waktu tiga bulan ini dapat ditinjau dari beberapa proses peradilan atas kasus-kasus hukum dan HAM yang sedang berjalan, dan penanganan beberapa kasus pemanfaatan SDA secara ilegal dibidang kehutanan dan perikanan. Ada kemajuan dengan persidangan HAM di Makassar dimana para terdakwa, Jony Wainal Usman dan Daud Sihombing, SH diijinkan oleh pimpinan kepolisian untuk mengikuti beberapa tahap dari proses persidangan tersebut. Sementara putusan peradilan yang memenangkan gugatan Kodam Trikora melawan Elsham Papua dalam kasus Timika, amat mempengaruhi terciptanya suasana kebisuan bagi siapa saja

---

<sup>2</sup> KPU Irija Barat baru terbentuk pada 15 Desember 2003 dengan seorang Sekretaris yang baru dilantik oleh KPU Pusat pada 28 Desember 2003, sedangkan Panwaslu Irija Barat baru terbentuk dan anggotanya dilantik oleh Panwaslu Pusat pada 30 Mei 2004; sementara proses seleksi calon anggota Legislatif oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia' khususnya di Provinsi Papua pada Januari 2004.

yang hendak mengungkapkan fakta pelanggaran hak dasar masyarakat dan kesewenang-wenangan secara transparan kepada publik; disamping memang memberikan pesan positif berupa kehati-hatian dalam upaya membangun advokasi yang berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa kasus pengambilan hasil hutan (kayu) dan ikan secara ilegal di perairan-perairan di Papua, terbaca memang sedang ditangani oleh instansi terkait. Namun belum menunjukkan adanya keseriusan dalam suatu proses penegakkan hukum secara memadai dan tuntas sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan membantu menciptakan perubahan sistem pengelolaan SDA di Papua.

#### **4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Tiga kondisi faktual: pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi dapat menjadi pegangan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Dibidang kesehatan, masyarakat masih tetap bergelut dengan penyebaran epidemi HIV/AIDS, TBC maupun malaria yang setiap saat dapat menyerang warga hingga menyebabkan kematian. Rumah sakit-rumah sakit di Papua yang umumnya disubsidi pemerintah daerah melalui APBD, sejak awal tahun 2004 mendapatkan kesulitan untuk beroperasi secara maksimal akibat macetnya penyaluran dana-dana termasuk dana Otsus dari pemerintah pusat. Di bulan April, RSUD Wamena secara resmi dinyatakan tutup oleh direktornya setelah persediaan obat-obatan di rumah sakit tersebut habis dan seluruh tenaga medisnya memilih untuk mogok bekerja karena gaji mereka, termasuk para dokter, tidak dibayar sejak bulan Februari 2004. RSUD Abepura di Jayapura maupun RSUD Sorong mengalami hal serupa. Keduanya tidak mampu melayani obat-obatan dan menerima pasien rawat inap untuk beberapa saat lamanya.

Dibidang pendidikan, para orang tua disibukkan dengan ujian akhir yang dilalui anak-anaknya di SD, SMP dan SMU yang berlangsung sesuai standar nasional yang ditetapkan pemerintah, ditengah situasi sekolah-sekolah di Papua yang minim tenaga guru maupun peralatan yang tidak memadai. Pengumuman hasil ujian telah dilakukan oleh masing-masing sekolah, namun pemerintah daerah belum memberikan suatu analisa statistik yang dapat memperlihatkan tingkat mutu kelulusan di Papua sesuai standar nasional tersebut.

Di bidang ekonomi, pemberitaan diwarnai kemacetan yang terjadi di sejumlah Pemda Kabupaten dalam membayar jasa para pengusaha kontraktor yang telah menyelesaikan proyek-proyek pemerintah setempat, bahkan statusnya menjadi "utang" pihak Pemda kepada para pengusaha dalam jumlah milyaran rupiah. Terlepas dari apakah penyelesaian proyek-proyek tersebut bermutu ataukah tidak, serta benar-benar menguntungkan bagi kepentingan masyarakat banyak (faktor efisiensi). Mengingat dalam prakteknya, ada kesan bahwa pejabat Pemda yang bertanggung jawab dalam menangani suatu proyek biasanya hanya ingin menghabiskan dana yang dianggarkan per-tahun anggaran APBD sehingga kemudian bekerja sama dengan pengusaha yang dikenalnya. Ini merupakan salah satu mekanisme kerja yang memudahkan terjadinya praktik korupsi, namun belum pernah terungkap ke permukaan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menjamur tatkala berlakunya Otonomi Khusus dengan dananya yang melimpah.

Fenomena kemacetan pembayaran jasa para pengusaha kontraktor tersebut diatas, membuat Ketua Kadin Papua meminta para pengusaha di daerah ini agar tidak hanya menggantungkan usahanya pada proyek pemerintah. Hal tersebut dapat menjelaskan kepada kita jika sesungguhnya struktur ekonomi di Papua ini stagnan, masih dimonopoli oleh pemerintah, dan bersifat konsumtif, dimana para pengusaha tidak kreatif dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berorientasi pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada membaiknya pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bisnis semacam ini dapat juga membantu membuka lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran di Papua.

Disisi lain, kegiatan ekonomi Papua juga tetap diwarnai oleh catatan-catatan kelam tentang pencurian sumber daya alam berupa, hasil hutan (kayu) dan hasil laut yang menghilangkan pendapatan bagi masyarakat daerah ini, juga menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup yang pada suatu saat dapat merugikan derajat kualitas hidup masyarakat di daerah ini.

## **5. Aspek Gerakan Masyarakat Sipil**

Gerakan masyarakat sipil diwarnai dengan beberapa aksi demo damai, baik di Jakarta maupun di Jayapura yang umumnya menyangkut tuntutan terhadap penegakan hukum, hak asasi manusia dan penyelesaian konflik di Papua. Gerakan tersebut ditandai juga dengan upaya Dewan Adat Papua yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan di Papua, dengan mendekati sejumlah anggota DPRD Provinsi Papua yang baru terpilih dalam Pemilu 5 April. Kemungkinan bahwa terbentuknya Koalisi Pembaharuan Papua yang beranggotakan 34 anggota DPRD hasil Pemilu 5 April, merupakan hasil dari upaya tersebut diatas.

Namun demikian, di tengah masyarakat di beberapa tempat, sedang tercipta potensi keterpecahan yang bila tidak ditangani secara baik dapat berkembang menjadi konflik terbuka di kemudian hari. Suasana di Manokwari pasca peresmian Provinsi Irija Barat dengan segala upaya untuk melegalkannya, belakangan ini telah berubah menjadi diskusi antar masyarakat dengan mengetengahkan stigma 'separatis' untuk mencap kelompok yang berseberangan dengan cita-cita tersebut. Ini merupakan satu perkembangan terbaru; bila sebelumnya stigma yang sungguh ampuh untuk melumpuhkan daya gerak bahkan dapat menghilangkan nyawa siapa saja yang mendapatkan stigma dimaksud, umumnya dinyatakan oleh pihak penguasa, baik dalam pernyataan-pernyataan resmi maupun melalui putusan pengadilan dalam kasus-kasus pidana makar. Namun belakangan ini stigma tersebut dipergunakan antar masyarakat sipil sebagai senjata untuk menghantam mereka yang dianggap sebagai lawan sehingga akan mudah dijadikan dasar bagi penguasa untuk mengambil suatu tindakan hukum juga politik terhadap pihak yang digolongkan separatis itu. Padahal, yang menjadi target utama dalam diskusi panas semacam ini umumnya tentu hanya berkisar pada kekuasaan semata. Maka, sangatlah tidak bermoral bila nasib orang banyak dikorbankan hanya demi mencapai kepentingan pribadi semacam ini. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudah begitu jauhkah kehancuran mental yang sedang melanda masyarakat Papua sehingga

berubah menjadi komunitas bergaya 'pragmatis' yang dengan mudah memungkirkan kepentingan masyarakatnya sendiri!

Lain lagi situasi yang terlihat di Biak, Timika dan Nabire dimana sekelompok warga, dengan didukung beberapa pejabat setempat, menuntut pemerintah pusat agar mengaktifkan kembali Provinsi Irija Tengah yang pernah ditunda dan mengusulkan masing-masing ibukota kabupaten untuk dijadikan ibukota Provinsi tersebut. Gerakan menuntut pemekaran dari sekelompok masyarakat ini nampak begitu mudah mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu di pemerintah pusat di Jakarta, seperti dari Depdagri, sekalipun Mendagri sendiri pada 30 April telah mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran wilayah di seluruh Indonesia untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Pengalaman di Manokwari dan Timika telah membuka mata kita semua bahwa polarisasi di masyarakat yang akhirnya menimbulkan konflik terbuka, terjadi setelah adanya dukungan yang kuat dari beberapa 'unsur' pemerintah pusat terhadap salah satu kelompok (pro-pemekaran). Karena itu, tetap mengherankan bagi siapa saja terhadap sikap yang diperlihatkan Presiden Megawati dalam kunjungan kilatnya ke Timika pada 23 Mei, yang hanya memberikan kesempatan "bicara" bagi kelompok masyarakat di Timika yang mendukung pemekaran Irija Tengah. Sulit dihindari kesan bahwa konflik hendak 'dipelihara' terus oleh pemerintah sendiri. Maka, menjadi pertanyaan mendasar adalah "apakah pemerintah pusat memiliki kehendak baik untuk menyelesaikan masalah Papua?".

Kemudian, kekritisan yang ditunjukkan dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan para pemimpin Gereja-Gereja di Lembah Baliem, Wamena pada , menimbulkan tanda tanya bagi kita semua, sebenarnya ada apa dengan relasi antar pemeluk agama di daerah ini! Kerukunan antar pemeluk agama yang nampak di permukaan, rupanya tidak menggambarkan suasana sesungguhnya yang sedang terjadi di tingkat akar rumput sebagaimana tercermin dalam pernyataan ini. Para pimpinan agama, pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat di Wamena maupun di Jayapura mesti mendiskusikan hal ini secara terbuka dan mencari jalan penyelesaian terbaik guna mencegah ketegangan yang sudah ada yang mungkin dapat berubah menjadi konflik sektarian yang lebih dahsyat dan menghancurkan segala sendi kehidupan bermasyarakat, bukan hanya di Lembah Baliem, namun bisa saja meluas ke seluruh wilayah Tanah Papua. Biarlah pengalaman pahit dengan konflik di Maluku maupun Poso, menjadi pelajaran berharga bagi kita semua yang menginginkan Papua terus menjadi "Tanah Damai".

## **6. Aspek Nasional dan Internasional**

Dinamika nasional yang berdampak terhadap Papua, selain pada proses Pemilu yang turut menarik perhatian masyarakat dalam tiga bulan ini, tetapi lebih pada masih terlihatnya keengganan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, seperti membereskan kekacauan hukum yang terjadi dalam proses pemekaran provinsi maupun membuat kebijakan yang mendukung terlaksananya Otsus di Papua secara benar. Terkesan bahwa dengan tampilnya beberapa purnawirawan TNI dalam pencalonan presiden RI untuk Pemilu kali ini, semakin memberikan keleluasaan bagi pimpinan militer dalam menafsirkan segala perubahan yang terjadi secara nasional maupun di daerah

konflik sesuai kepentingan pertahanan semata. Selain konflik di Aceh, Poso dan Ambon, beberapa kejadian kekerasan di Papua menjelang pemilu dengan serta-merta diumumkan dilakukan oleh kelompok GPK atau TPN/OPM. Stigmatisasi rupanya menjadi senjata ampuh untuk memaknai berbagai peristiwa keamanan yang terjadi di Papua tanpa adanya suatu proses investigasi dan penyelidikan hukum yang memadai.

Pengusiran Sidney Jones dan lembaganya (ICG) dari Jakarta/Indonesia, yang sebagian besar berdasarkan penilaian dari Badan Intelijen Nasional (BIN) memberikan indikasi yang jelas bagi menguatnya kembali militerisme di jajaran pemerintahan pusat. Namun juga, perlahan-lahan memperkuat gejala 'kebal hukum' bagi aparat keamanan di Indonesia.

Di tingkat internasional, kita semua dikejutkan oleh pernyataan Jaksa Agung Amerika Serikat mengenai pelaku penembakan di Timika Agustus 2002, yang menurut hasil investigasi FBI dilakukan oleh Anthon Wamang sebagai anggota TPN/OPM. Dikuatirkan pernyataan ini kemudian akan memicu dan menjadi pembenaran bagi adanya aksi militer di wilayah Timika dan sekitarnya yang kemudian dapat juga meluas ke wilayah Pegunungan Tengah Papua, dalam rangka mengejar dan membasmi pelaku. Hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari pujian Dubes AS untuk Indonesia terhadap kerjasama TNI/Polri dan FBI dalam menangani kasus ini.